



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 73, 2014**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2014**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka lebih meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Besaran komponen tambahan penghasilan dalam bentuk TPK dan/atau TPPT yang diterima oleh PNS ditentukan berdasarkan kinerja bulan kedua sebelumnya;
- (2) Penamaan tambahan penghasilan sama dengan bulan tambahan penghasilan dibayarkan.
- (3) Standar biaya TPD, TPK dan TPPT bagi PNS yang bertugas di SKPD selain DPKD sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (4) Standar biaya TPD, TPK, TPPT bagi PNS yang bertugas di SKPD selain DPKD sebagaimana tercantum pada lampiran II a dan lampiran II b Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Diantara Lampiran II dan lampiran III disisipkan 2 (dua) Lampiran yaitu Lampiran II a dan Lampiran II b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Oktober 2014  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 21 Oktober 2014  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

dto

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR: 73

Lampiran I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 73 Tahun 2014  
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Lampiran II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 73 Tahun 2014  
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR DAN TAMBAHAN KINERJA BAGI PNS YANG BERTUGAS DI SKPD SELAIN DPKD**

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN/ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR				TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA				JUMLAH				
			GOLONGAN				GOLONGAN				GOLONGAN				
			IV	III	II	I	IV	III	II	I	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	JABATAN STRUKTURAL	1 Eselon I.b	5,600,000				7,672,000					13,272,000			
		2 Eselon II.a	4,880,000				6,68,500					11,568,500			
		3 Eselon II.b	4,400,000				6,028,000					10,428,000			
		4 Eselon II.b sebagai Ajudan/Sekretaris Pribadi	4,832,000				6,619,800					11,451,800			
		5 Eselon III.a Pimpinan SKPD/ Sekretaris Pribadi	3,040,000	3,010,000			4,164,800	3,356,200				7,204,800	6,366,200		
		6 Eselon III.a	2,290,000	2,683,000			3,137,300	2,519,900				5,427,300	4,779,900		
		7 Eselon III.b	1,996,000	1,969,000			2,734,500	2,195,400				4,730,500	4,164,400		
		8 Eselon IV.a	1,178,200	1,158,200			1,614,100	1,291,400				2,792,300	2,449,600		
		9 Eselon IV.a sebagai Ajudan/Sekretaris Pribadi	1,610,200	1,581,200			2,206,000	1,763,000				3,816,200	3,344,600		
II	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	1 Fungsional Ahli	1,164,000	1,146,000			1,594,700	1,277,800			2,758,700	2,423,800			
		2 Fungsional Terampil		617,000	611,500			688,000	599,300			1,305,000	1,210,800		
III	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	1 Sespri gubernur/Sespri Wakil Gubernur	964,000	946,000	937,000	932,500	1,320,700	1,054,800	918,300	885,900	2,284,700	2,000,800	1,855,300	1,818,400	
		2 Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/Ajudan Ketua DPRD	868,000	852,000	844,000	840,000	1,189,200	950,000	827,100	798,000	2,057,200	1,802,000	1,671,100	1,638,000	
		3 Pramu Administrasi Pimpinan	772,000	758,000	751,000	747,500	1,057,600	845,200	736,000	710,100	1,829,600	1,603,200	1,487,000	1,457,600	
		4 Sopir Pimpinan	820,000	805,000	797,500	793,750	1,123,400	897,600	781,600	754,050	1,943,400	1,702,600	1,579,100	1,547,800	
		5 Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Penerima	628,000	617,000	611,500	608,750	860,400	688,000	599,300	578,350	1,488,400	1,305,000	1,210,800	1,187,100	
		6 Jabatan Fungsional Umum lainnya	580,000	570,000	565,000	562,500	794,600	635,600	553,700	534,400	1,374,600	1,205,600	1,118,700	1,096,900	

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERTIMBANGAN TERTENTU BAGI PNS YANG BERTUGAS DI SKPD SELAIN DPKD**

NO	NAMA DAERAH/NAMA JABATAN	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Agam	462.000	411.200	392.600	390.600
2	Kabupaten Dharmasraya	750.000	667.500	634.100	634.100
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.500.000	1.335.000	1.268.300	1.268.300
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	567.000	504.600	479.400	479.400
5	Kabupaten Padang Pariaman	183.000	162.900	154.700	154.700
6	Kabupaten Pasaman	681.000	606.100	575.800	575.800
7	Kabupaten Pasaman Barat	721.500	642.100	610.100	610.000
8	Kabupaten Pesisir Selatan	312.000	277.700	263.800	263.800
9	Kabupaten Sijunjung	514.500	457.900	435.000	435.000
10	Kabupaten Solok	226.500	201.600	191.500	191.500
11	Kabupaten Solok Selatan	688.500	612.800	582.100	582.100
12	Kabupaten Tanah Datar	414.000	368.500	350.000	350.000
13	Kota Bukittinggi	369.000	328.400	312.000	312.000
14	Kota Padang Panjang	292.500	260.300	247.300	247.300
15	Kota Pariaman	226.500	201.600	191.500	191.500
16	Kota Payakumbuh	502.500	447.200	424.900	424.900
17	Kota Sawahlunto	385.500	343.100	325.900	325.900
18	Kota Solok	259.500	231.000	219.400	219.400
19	Kepala Kantor Penghubung	3.375.000	3.004.000	-	-
20	Kepala UPTD Anjungan TMI	2.250.000	2.002.500	-	-
21	Kas/Kasubag/JFU/JFT pada Kantor Penghubung/UPTD Anjungan TMI	1.780.000	1.588.700	1.500.000	1.500.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Lampiran II a : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 73 Tahun 2014  
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Lampiran II b : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 73 Tahun 2014  
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR DAN TAMBAHAN KINERJA BAGI PNS PADA DPKD**

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN/ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR				TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA				JUMLAH				
			GOLONGAN				GOLONGAN				GOLONGAN				
			IV	III	II	I	IV	III	II	I	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	JABATAN STRUKTURAL	1 Eselon II.a	4,880,000				4,758,000					9,638,000			
		2 Eselon III.a	2,290,000	2,683,000			2,232,800	1,723,300				4,522,800	3,83,300		
		3 Eselon IV.a	1,178,200	1,158,200			1,148,800	883,200				2,327,000	2,041,400		
II	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	1 Fungsional Ahli	1,164,000	1,146,000			1,134,900	873,900			2,298,900	2,019,900			
		2 Fungsional Terampil		617,000	611,500				470,500	599,300			1,087,500	1,009,000	
III	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	1 Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Penerima	628,000	617,000	611,500	608,750	612,300	470,500	599,300	380,500	1,240,300	1,087,500	1,009,000	989,300	
		2 Jabatan Fungsional Umum lainnya	580,000	570,000	565,000	562,500	565,500	434,700	553,700	351,600	1,145,500	1,004,700	932,300	914,100	

GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 dto  
 IRWAN PRAYITNO

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERTIMBANGAN TERTENTU PNS PADA DPKD**

NO	NAMA DAERAH/NAMA JABATAN	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Agam	385.000	342,700	352,600	325.600
2	Kabupaten Dhamasraya	625.000	556,300	528,500	528.500
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.250.000	1.112.500	1.056.900	1.058.900
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	472.000	420.600	399,500	399.500
5	Kabupaten Padang Pariaman	152.000	135,800	129.000	129.000
6	Kabupaten Pasaman	567.000	505.100	479.900	479.900
7	Kabupaten Pasaman Barat	601.300	535.800	508.400	508.400
8	Kabupaten Pesisir Selatan	260.000	231,400	219.900	219.900
9	Kabupaten Sijunjung	428.800	381.600	362.600	362.600
10	Kabupaten Solok	188.800	168.000	159.600	159.600
11	Kabupaten Solok Selatan	573.800	510.700	485.200	485.200
12	Kabupaten Tanah Datar	345.000	307.100	291.700	291.700
13	Kota Bukittinggi	307.500	273.700	260.000	260.000
14	Kota Padang Panjang	243.800	217.000	206.100	206.100
15	Kota Pariaman	188.800	168.000	159.600	159.600
16	Kota Payakumbuh	418.800	372.700	354.100	354.100
17	Kota Sawahlunto	321.300	286.000	271.700	271.700
18	Kota Solok	216.300	192.500	182.900	182.900

GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 dto  
 IRWAN PRAYITNO